

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA LIMA PROVINSI TERTIMPANG DI INDONESIA

Hikmah Nurain, Indri Arrafi Juliannisa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: hikmahnurain@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted to find out the effect of economic growth, the human development index, the provincial minimum wage, and provincial government capital expenditure on the level of income inequality. This research uses five provinces with the highest inequality including the Special Region of Yogyakarta, Gorontalo, West Java, DKI Jakarta, and Papua. The sample determination uses a saturated sampling technique with 5 provinces from 2015-to 2020, so the total sample is 30 data. The data type is secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS). This research uses a multiple linear regression method with panel data analysis and program Eviews 10 with a significance level of 5% (0.05). Partially, the results show that the human development index, the provincial minimum wage, and the realization of provincial government capital expenditures have a significant effect on income inequality, while economic growth has no effect. The results also show that simultaneously the four independent variables affect income inequality.

Keywords: income inequality; human development index; provincial minimum wage; provincial government capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, dan belanja modal pemerintah provinsi terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan lima provinsi dengan ketimpangan tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua. Penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan 5 provinsi selama tahun 2015-2020, sehingga jumlah sampel sebanyak 30 data. Jenis datanya adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan analisis data panel dan program Eviews 10 dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, dan realisasi belanja modal pemerintah provinsi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara simultan keempat variabel bebas berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata kunci: ketimpangan pendapatan; indeks pembangunan manusia; upah minimum provinsi; belanja modal pemerintah provinsi

PENDAHULUAN

Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan utama proses pembangunan ekonomi yang dirancang oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun sering menjadi dilemma dimana dalam mencapai kesejahteraan ekonomi tersebut, pemerintah sering lebih fokus pada upaya pertumbuhan ekonomi, namun tidak terlalu memperhatikan perihal kesenjangan atau ketidakmerataan ekonomi itu sendiri. Berdasarkan pada teori dari Simon Kuznets (1995) dalam hipotesisnya yang menyatakan bahwa terdapat kurva U terbalik yang merepresentasikan kondisi

dimana distribusi pendapatan akan semakin tidak merata ketika pembangunan dimulai, tetapi akan semakin merata disaat pembangunan telah mencapai pada tingkat tertentu (Fauzia dan Suseno, 2017). Ketimpangan yang semakin tinggi dapat menimbulkan permasalahan ekonomi, kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi, dan kriminalitas (BPS DIY dan Bappeda DIY, 2020) Adapun untuk mengukur ketimpangan pendapatan salah satunya menggunakan koefisien gini (Riandi dan Varlitya, 2020). Koefisien ini dikenal dengan gini ratio. Di Indonesia sendiri Gini ratio dihitung

berdasarkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020). Berikut ini data gini rasio dari lima Provinsi yang berkisar

antara 0 sampai 1, apabila mendekati 0 maka termasuk ketimpangan rendah namun apabila mendekati 1 maka termasuk ketimpangan tinggi.

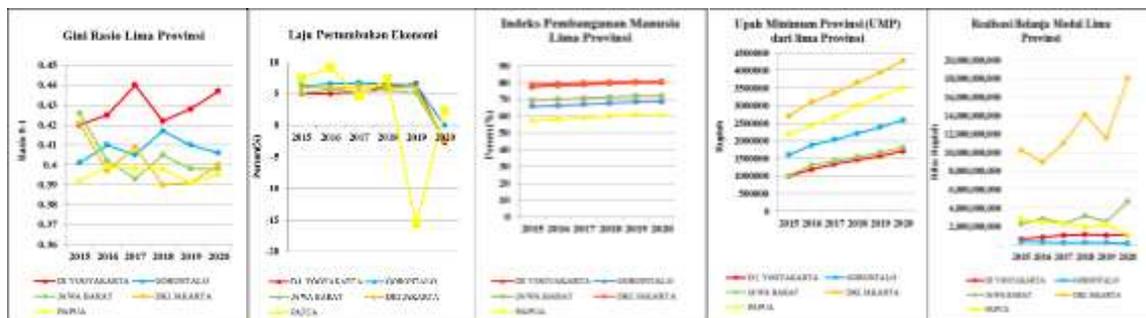
Tabel 1
Gini Rasio Lima Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi di Indonesia

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DI Yogyakarta	0.420	0.425	0.440	0.422	0.428	0.437
Gorontalo	0.401	0.410	0.405	0.417	0.410	0.406
Jawa Barat	0.426	0.402	0.393	0.405	0.398	0.398
DKI Jakarta	0.421	0.397	0.409	0.390	0.391	0.400
Papua	0.392	0.399	0.398	0.398	0.391	0.395
Indonesia	0.402	0.394	0.391	0.384	0.380	0.385

Sumber: Data Diolah 2022

Berlandaskan pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dibawah ini, terdapat lima Provinsi dengan angka ketimpangan tertinggi meliputi DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Papua. Kelima Provinsi tersebut mempunyai aktivitas ekonomi yang baik bahkan mayoritas lebih tinggi dari pertumbuhan nasional dalam 6 tahun terakhir, namun ketimpangan yang ada juga melebihi tingkat nasional.

Kelima daerah selalu masuk kedalam sepuluh besar Provinsi dengan ketimpangan tertinggi sejak tahun 2015, kemudian menempati posisi 5 tertinggi di tahun 2020. Terdapat berbagai penyebab dari adanya ketimpangan ini, diantaranya yakni Pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tingkat upah minimum, dan realisasi belanja modal, berikut ini grafik perbandingan dari keempat faktor.



Gambar 1
Perbandingan Ketimpangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi, IPM, UMP, dan Belanja Modal dari Lima Provinsi Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015-2020)

Berlandaskan teori dari Kuznets, lazimnya ketika pertumbuhan ekonomi menurun ketimpangan ikut menurun, namun data menunjukkan bahwa gini rasio kelima provinsi cenderung meningkat kecuali pada Provinsi Gorontalo. Provinsi dengan ketimpangan tertinggi yakni DI Yogyakarta secara mayoritas memiliki angka ketimpangan yang berfluktuasi namun cenderung meningkat. Ketimpangan di DIY disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi dan keterbatasan yang dimiliki setiap daerah, serta adanya pemusatan pembangunan di daerah yang sudah baik seperti Kota Yogyakarta dan Kab.

Kulon Progo (Kusuma, Sarfiah dan Septiani, 2019). Pada Provinsi Gorontalo terjadi *gap* teori pada tahun 2018 dimana ketimpangan naik ketika pertumbuhan ekonomi menurun, hal ini dikarenakan adanya perlambatan kinerja para tenaga kerja di sektor pertanian akibat penurunan hasil panen (Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, 2018). DKI Jakarta memiliki *gap* pada tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi menurun, ketimpangan sedikit meningkat, berdasarkan data BPS salah satu penyebabnya adalah menurunnya realisasi belanja modal tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dalam buku Priyono & Ismail, terdapat teori dari Gary S. Becker tentang *human capital* dimana dikatakan bahwa dalam modal manusia investasi yang paling penting berada pada pendidikan, pelatihan, dan kesehatan (Priyono dan Zainuddin Ismail, 2016). Teori ini menerangkan bahwa manusia dengan pendidikan tinggi akan mempunyai pekerjaan dengan upah lebih besar dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah (Islami dan SBM, 2018). Grafik diatas menyajikan data bahwa IPM di lima Provinsi mayoritas mengalami peningkatan dalam 6 tahun terakhir. Hal ini membuktikan adanya ketidaksesuaian dengan teori Gary, dimana data menunjukkan bahwa IPM yang selalu meningkat tidak diiringi dengan ketimpangan yang menurun.

Berkaitan dengan upah, menurut Hugh Rockoff dalam buku Priyono & Ismail, dijelaskan terkait teori Kontrol Harga yang menyatakan bahwa pemberlakuan upah minimum diperuntukan demi adanya peningkatan pendapatan pada golongan pekerja miskin yang bekerja di pasar (Priyono dan Zainuddin Ismail, 2016). Berdasarkan pendapat Hugh tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum diberlakukan demi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin demi mempersempit ketimpangan pendapatan. Berdasarkan Grafik diatas, terlihat bahwa upah minimum Provinsi (UMP) di lima Provinsi selalu mengalami peningkatan namun ketimpangan tidak ikut menurun hal ini menandakan bahwa upah minimum yang ditetapkan tidak secara merata dirasakan oleh masyarakat di setiap daerah.

Faktor berikutnya yang dipandang mampu mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan adalah belanja modal pemerintah daerah Provinsi. Secara umum alokasi belanja modal pemerintah ini difungsikan untuk membangun fasilitas publik yang dibutuhkan dengan harapan dapat meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi serta memperbesar penyerapan tenaga kerja, sehingga ketimpangan pendapatan pun akan menurun (Anshari, Azhar, & Ariusni, 2018). Berdasarkan data realisasi belanja modal diatas, dapat diketahui bahwa DKI merupakan daerah dengan realisasi belanja modal tertinggi di Indonesia namun ketimpangan di DKI Jakarta tetap terjadi akibat adanya peningkatan jumlah penduduk DKI setiap tahunnya dan tingginya arus urbanisasi yang berdampak pada pengangguran (Nadya dan Syafri, 2019)

Terdapat berbagai penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya

dilakukan oleh Rosa dan Sovita, (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan dan berkoefisien negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Kardita, Setiawina dan Budiasa, (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif pada ketimpangan di Bali. Menurut penelitian Hariani, (2019) IPM berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan di Jawa Timur, namun Suryani dan Woyanti, (2021) memiliki hasil bahwa IPM berkoefisien negatif. Disisi lain Anshari, dkk (2018) meneliti terkait pengaruh upah minimum dan belanja modal terhadap ketimpangan nasional dan didapati hasil bahwa keduanya berpengaruh signifikan namun upah minimum memiliki pengaruh negatif, sedangkan belanja modal berpengaruh positif.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian para peneliti tersebut, serta belum banyak peneliti yang membahas daerah timur Indonesia, maka diperlukan adanya penelitian lain yang mampu memperkuat analisis terkait ketimpangan yang terjadi di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi atau gagasan lain untuk menurunkan angka ketimpangan pendapatan khususnya di lima Provinsi tertimpang di Indonesia yakni Provinsi DIY, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua. Oleh karena itu disusunlah penelitian ini yang diberi judul “**Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan pada Lima Provinsi Tertimpang di Indonesia**”.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian meliputi Ketimpangan Pendapatan sebagai variabel terikat dan variabel bebas yakni Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi, dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Provinsi DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dan telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah menggunakan *software* EViews 10. Untuk menjawab tujuan penelitian, penelitian ini menerapkan analisis regresi dengan menggunakan data panel. Data panel adalah kombinasi dari data *time series* dan data *cross section* (Gujarati dan Porter, 2015). Data *time series* yang digunakan adalah 6 tahun terhitung sejak 2015-2020, sedangkan data *Cross Section* adalah 5 Provinsi tertimpang sehingga keseluruhan jumlah observasi adalah 30 data. Dilakukan pula uji asumsi klasik

agar hasil dari model yang diestimasi tidak bias atau *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*.

Dalam melakukan estimasi model regresi data panel, terdapat beberapa model yang dapat digunakan antara lain Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Adapun untuk menentukan model terbaik, diperlukan beberapa uji yakni *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiplier Test* (Ghozali dan Ratmono, 2017). Untuk uji signifikansi pada model dilakukan pula uji t, uji F, uji *R-Squared* dan *Adjusted R-squared*. Berikut persamaan regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini :

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{1it} + \beta_2 IPM_{2it} + \beta_3 LNUMP_{3it} + \beta_4 LNBM_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

GR	=Ketimpangan Pendapatan(Persen)
β_0	=Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=Koefisien garis regresi
PE	=Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
IPM	=Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
LNUMP	=Log Natural Upah minimum Provinsi (Rasio)
LNBM	=Log Natural Belanja Modal Pemerintah Provinsi (Rasio)
i	=Provinsi (DIY, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua)
t	=Waktu (2015-2020)

Penelitian Terdahulu

Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, menurut Ermatry Hariani dalam penelitiannya dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan, akibat dari adanya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Naiknya jumlah penduduk akan berpengaruh pada jumlah pengangguran, sehingga *gap* antara penduduk kaya dan penduduk miskin pun kian memburuk (Hariani, 2019). Berkaitan dengan IPM, dalam penelitian milik Kusuma, Sarfiah dan Septiani dijelaskan bahwa peningkatan IPM artinya terdapat peningkatan pada pendidikan, kesehatan, dan daya beli penduduk itu sendiri, sehingga peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan pendapatan (Kusuma, Sarfiah dan Septiani, 2019).

Dalam penelitian Rifki Khoirudin dan Jannatul Liutammima Musta'in dijelaskan bahwa Undang-Undang upah minimum diharapkan menjadi faktor penting yang secara relevan mampu berkontribusi menurunkan ketimpangan upah antar

masyarakat di Indonesia (Khoirudin dan Musta'in, 2020). Terkait belanja modal, Wita Musfetriyeti dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa belanja modal yang dialokasikan secara tepat dan bersinergi dengan alokasi belanja lainnya, akan dapat mewujudkan tujuan ekonomi makro yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan (Musfetriyeti, 2017).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya ialah penelitian oleh Muhammad Anshari, Zul Azhar, Ariusni, pada tahun 2018 dengan wilayah penelitian pada seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2012-2017. Pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi data panel dan memiliki hasil Pendidikan tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan upah minimum provinsi dan belanja modal memiliki pengaruh yang berarti terhadap ketimpangan namun memiliki korelasi yang berbeda yakni upah memiliki koefisien negatif, sedangkan belanja modal memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian oleh A. A. Gede Dirga Kardita, Nyoman Djinar Setiawina, dan I Gede Sujana Budiasa pada tahun 2018, dilakukan di wilayah Bali pada tahun 1996-2015. Pengujian menggunakan metode analisis regresi berganda data *time series* dan memiliki hasil DAU, inflasi, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara positif yang signifikan, namun untuk Share Ekspor Impor terhadap PDRB/ *Trade Open* terbukti tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian oleh Ermatry Hariani pada tahun 2019 di 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda data panel dan memiliki hasil IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan TPT dan UMK tidak memiliki pengaruh yang berarti atau signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian oleh Rose Gita Cahya Saputri pada tahun 2017 di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006-2015. Penelitian dilakukan menggunakan pengujian model analisis regresi berganda data panel dan memiliki hasil kedua variabel bebas yakni Rasio Produktivitas Sektoral (Pertanian dan Industri), dan Laju PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Rasio Produktivitas Sektoral berpengaruh secara positif, sedangkan Laju PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian oleh Ferdinand Niyimbanira pada tahun 2017 di Provinsi Mpumalanga Afrika

Selatan pada tahun 1996-2014. Adapun pengujian dilakukan menggunakan *fixed effect and pool regression models with The panel regression analysis* yang memiliki hasil variabel *Economic Growth* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *Income Inequality*.

Penelitian oleh Krisna Gita Suryani dan Nenik Woyanti pada tahun 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2018. Menggunakan metode analisis regresi berganda data panel yang memiliki hasil bahwa *Economic Growth* tidak berpengaruh signifikan, sedangkan tiga variabel lainnya berpengaruh secara signifikan, yaitu *HDI* berpengaruh negatif, *Distric/City Minimum Wage* berpengaruh positif, dan *Open Unemployment Rate* berpengaruh positif pada ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan daerah yang diteliti, dimana mencakup pada lima Provinsi di Indonesia yang memiliki angka ketimpangan tertinggi dimana terdapat beberapa daerah yang jarang sekali diperhatikan terkait kondisi ketimpangan pendapatannya seperti Papua dan Gorontalo karena mayoritas peneliti sebelumnya lebih berfokus pada suatu Provinsi di Pulau Jawa. Tahun penelitian yang digunakan juga berbeda, dimana dalam penelitian ini digunakan enam tahun dengan data terbaru hingga tahun 2020. Kebaharuan lainnya ialah belum terdapat penelitian yang meneliti pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, IPM, UMP, dan belanja modal pada ketimpangan pendapatan secara bersamaan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas terkait pengaruh keempat variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan.

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan.
 H₂ : Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan.
 H₃ : Diduga Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan.
 H₄ : Diduga Belanja Modal Pemerintah Provinsi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan.
 H₅ : Diduga Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Upah Minimum Provinsi, dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi berpengaruh secara

bersama-sama terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Normalitas dapat terdeteksi dengan nilai probabilitas Jarque-Bera tidak signifikan atau kurang dari 2, maka data terdistribusi normal (Ghozali dan Ratmono, 2017). Berdasarkan hasil uji dibawah ini terlihat bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0.769167, maka nilai probabilitas > alpha 0.05 (0.769167 > 0.05) maka data pada penelitian ini telah terbukti terdistribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	0.524894
Probability	0.769167

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2022

Uji Multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk melihat korelasi antarvariabel independen. Dengan ketentuan apabila korelasi antarvariabel independen melebihi 0.80 maka terdapat gejala multikolinieritas (Ghozali dan Ratmono, 2017). Berdasarkan hasil dibawah ini terlihat bahwa keseluruhan korelasi antar variabel berada dibawah angka 0.80 yang berarti bahwa seluruh variabel bebas dalam model regresi terbebas dari masalah multikolinieritas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

	PE	IPM	LNUPM	LNBM
PE	1.0000	0.0412	-0.2093	-0.0828
IPM	0.0412	1.0000	-0.1070	0.3481
LNUPM	-0.2093	-0.1070	1.0000	0.4649
LNBM	-0.0828	0.3481	0.4649	1.0000

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2022

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi hetero ini dapat dilakukan menggunakan Uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual dengan ketentuan tolak H₀ jika p-value masing-masing variabel < α (0,05), maknanya terdapat heteroskedastisitas dalam model (Ghozali dan Ratmono, 2017). Hasil dibawah ini menunjukkan bahwa nilai *P-Value* dari variabel PE (Pertumbuhan Ekonomi), IPM, LNUPM (Log Natural Upah Minimum Provinsi), LNBM (Log Natural Belanja Modal), bernilai lebih besar dari

alpha 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam model ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares

Variable	Prob.
C	0.3538
PE	0.7593
IPM	0.4586
LNUMP	0.1572
LNBM	0.2283

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2022

Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual satu observasi dengan ke observasi lainnya. Autokorelasi dapat terdeteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W) (Ghozali dan Ratmono, 2017) Berdasarkan hasil dibawah ini, terdapat nilai Durbin-Watson atau $d=1.554884$, maka nilai d ini perlu dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson dengan melihat jumlah observasi (n) dan jumlah variabel independen (k). Berdasarkan tabel Durbin-Watson, dengan $n=30$, $k=4$ dan alpha 5% maka didapatkan nilai $d_L=1.1426$ dan nilai $d_U=1.7386$. Berdasarkan kriteria uji Durbin-Watson apabila nilai Durbin-Watson terletak antara d_L dan d_U , maka tidak ada keputusan (ragu-ragu). Hasil yang didapatkan telah sesuai dengan kriteria $d_L(1.1426) < d(1.554884) < d_U(1.7386)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada keputusan (ragu-ragu) terkait masalah autokorelasi dalam model penelitian.

Tabel 5

Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.554884
--------------------	----------

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2022

PEMBAHASAN

Teknik Penentuan Model

Uji Lagrange Multiplier

Setelah dilakukannya Uji Chow dan diperoleh hasil bahwa model terbaik adalah *CEM*, kemudian dilanjutkan pada Uji Hausman dan didapati hasil bahwa model terbaik adalah *REM*. Untuk itu diperlukan Uji Lagrange Multiplier, uji ini digunakan untuk memilih model terbaik antara model *Random Effect* atau model *Common Effect*. Berdasarkan hasil uji LM test dibawah ini dapat

diketahui bahwa nilai *P-Value* dari *Breusch-Pagan* memiliki hasil 0.6032 yang artinya probabilitas *Breusch-Pagan* > 0.05 sehingga H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa model terbaik dalam penelitian ini adalah *CEM* (Jelanti, 2020).

Tabel 6

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Null (no rand. effect)	Cross-section
Alternative	One-sided
Breusch-Pagan	0.270202 (0.6032)

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2022

Model Common Effect (CEM)

Model CEM ini merupakan bentuk model yang paling sederhana, dimana pendekatannya mengabaikan dimensi ruang dan waktu dalam data panel, dengan metode yang digunakan untuk mengestimasi adalah metode OLS (*Ordinary Least Square*) (Ghozali dan Ratmono, 2017). Berikut hasil pengujian yang didapatkan:

1. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta adalah 62.06821 yang menunjukkan bahwa jika variabel PE, IPM, LNUMP, dan LNBM dianggap konstan maka ketimpangan pendapatan memiliki nilai sebesar 62.06821.
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar -0.005806 dan tidak signifikan. Hal ini berarti setiap kenaikan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar -0.005806 satuan dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.
3. Pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 0.095785 dan signifikan. Hal ini berarti setiap kenaikan rata-rata indeks pembangunan manusia sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.095785 satuan.
4. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar -1.366124 dan signifikan. Hal ini berarti setiap kenaikan rata-rata upah minimum Provinsi sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar -1.366124 satuan.
5. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar -0.386350 dan signifikan. Artinya setiap kenaikan rata-rata belanja modal sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar -0.386350 satuan.

Tabel 7
Hasil Uji Model Common Effect

Dependent Variable: GR
Method: Panel Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	62.06821	7.152188	8.678213	0.000000
PE	-0.005806	0.038316	-0.151526	0.880800
IPM	0.095785	0.025445	3.764375	0.000900
LNUMP	-1.366124	0.538860	-2.535212	0.017900
LNBM	-0.386350	0.173776	-2.223262	0.035500

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2022

Hasil Uji Hipotesis dan Analisis

Uji t

Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau membandingkan probabilitas dari tiap t_{hitung} dengan alpha dimana t_{hitung} dianggap bernilai konstan. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< \alpha$ (0.05) maka H_0 diterima, yang artinya variabel bebas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. Nilai t_{tabel} didapatkan dari tabel dengan nilai $df=n-k$, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen (Ghozali dan Ratmono, 2017). Nilai $df=26$ dan signifikansi 0.05, sehingga didapatkan t_{tabel} sebesar 2.056. Berdasarkan hasil uji t dibawah ini dapat diketahui bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang memiliki t_{hitung} (0.151526) $< t_{tabel}$ (2.056), dengan probabilitas sebesar 0.8808 dimana angka ini lebih besar dari alpha 5% (0.8808 $>$ 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Adapun untuk variabel bebas lainnya yakni IPM, UMP, dan Belanja Modal memperlihatkan hasil yang sama yakni t_{hitung} di masing-masing variabel lebih besar dari t_{tabel} (2.056), dan nilai probabilitas ketiga variabel lebih kecil dari alpha 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan secara individual.

Tabel 8
Hasil Uji t

Dependent Variable: GR
Method: Panel Least Squares

Variable	t-Statistic	Prob.
C	8.678213	0.0000
PE	-0.151526	0.8808
IPM	3.764375	0.0009
LNUMP	-2.535212	0.0179
LNBM	-2.223262	0.0355

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2022

Uji F

Uji F atau uji simultan ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan P -value lebih kecil dari alpha 5%, maka terbukti variabel bebas yang ada signifikan mempengaruhi variabel terikat secara simultan. Nilai F_{tabel} dengan k adalah jumlah variabel bebas dan variabel terikat, lalu n adalah jumlah observasi, maka didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 2.76, sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ (9.409107 $>$ 2.76), dan nilai probabilitas 0.000088 $<$ 0.05 yang berarti bahwa variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi, IPM, UMP, dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi terbukti signifikan mempengaruhi variabel terikat yakni ketimpangan pendapatan secara simultan dan penelitian layak untuk dilanjutkan.

Tabel 9
Hasil Uji F

F-statistic	9.409107
Prob(F-statistic)	0.000088

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2022

Koefisien determinasi R-squared dan Adjusted R-Squared

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa nilai R -squared (R^2) sebesar 0.600871 yang artinya variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, UMP, dan belanja modal pemerintah Provinsi dapat menjelaskan variabel ketimpangan pendapatan sebesar 60.09%, dan sisanya 39.91% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Untuk nilai $Adjusted$ R -Squared diperoleh angka sebesar 0.537011 yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, UMP, dan belanja modal pemerintah Provinsi dapat mempengaruhi variabel ketimpangan pendapatan sebesar 53.70%, sedangkan sisanya 46.30% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 10
Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.600871
Adjusted R-squared	0.537011

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2022

Analisis Pengaruh

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di

lima Provinsi artinya tidak sejalan dengan hipotesis yang ada. Berkaitan dengan teori Simon Kuznets dimana ia menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan karena terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern hingga pada titik tertentu akan mampu menurunkan ketimpangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode 2015-2020 telah berhasil berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan meskipun tidak signifikan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Saputri (2017) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2015 dimana pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan. Sejalan pula dengan Sidqiy *et al.*, (2020) yang meneliti secara nasional selama periode 2012-2017 dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif. Hasil pengaruh negatif dari penelitian ini membuktikan bahwa mulai adanya perluasan modal pada sektor modern di masing-masing daerah, hal ini terlihat dari semakin pesatnya sektor-sektor diluar pertanian yang berkembang pesat salah satunya adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan yang berbentuk UMKM, hal ini membuat persebaran pendapatan di masyarakat semakin membaik.

Di DIY sendiri kontributor terbesar terhadap PDRB adalah Industri Pengolahan, yakni mencapai Rp18.17 triliun atau 12.85% dari total PDRB pada tahun 2019. Dalam kurun waktu 2015-2019 pertumbuhan Industri Pengolahan cenderung meningkat, dan didominasi oleh UMK, bahkan lebih dari 90% industri (Kanwil DJPb Provinsi DIY, 2020). DKI memiliki lapangan usaha yang lebih beraneka ragam sehingga tidak ada sektor yang mendominasi. Akan tetapi kontribusi tertinggi tahun 2020 datang dari perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 16.62% terhadap PDRB dan Industri pengolahan sebesar 11.37% (Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, 2021). Jawa Barat pun demikian, salah satu sektor unggulan adalah industri pengolahan dengan porsi 41.19% terhadap PDRB. Sektor ini juga sangat menyerap tenaga kerja (Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, 2021). Provinsi Gorontalo memang masih mengandalkan sektor pertanian, namun saat ini sudah mulai memiliki sektor-sektor potensial lainnya meliputi industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, serta

penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor industri pengolahan berhasil menyerap banyak tenaga kerja yakni sebesar 19.24% di tahun 2018 atau sebanyak 111,405 tenaga kerja (BPS Provinsi Gorontalo, 2021). Papua sendiri memiliki kondisi yang mirip dengan Gorontalo dimana sektor pertanian masih menjadi sektor andalan, namun yang membuat berbeda adalah adanya sektor pertambangan di Papua yang sejak tahun 2016-2019 secara rata-rata berkontribusi mencapai 35.4% terhadap PDRB. Akan tetapi kontribusi sektor ini berfluktuasi dan cenderung menurun, sedangkan yang terus mengalami peningkatan adalah sektor pertanian (palawija), perkebunan (tanaman keras), kelautan dan perikanan, perdagangan, dan Industri (Bappeda Provinsi Papua, 2020).

Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan dan berkoefisien positif terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia. Artinya setiap kenaikan IPM akan meningkatkan ketimpangan. Hasil ini bertentangan dengan teori dari Gary S. Becker tentang *human capital* dimana dikatakan bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih besar (Islami and SBM, 2018). Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Hariani (2019), dimana IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di 38 Kab/Kota Jawa Timur tahun 2012-2015. Serta sesuai dengan pendapat dari Prawoto dan Cahyani (2020) dimana IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan di Pulau Jawa tahun 2012-2018 dimana dikatakan bahwa rata-rata lama sekolah di Jawa relatif tinggi, namun pertumbuhan itu hanya ada di daerah pusat perekonomian khususnya di kawasan industri atau kawasan berpenghasilan tinggi sehingga memicu disparitas ekonomi (Prawoto dan Cahyani, 2020).

DIY dengan ketimpangan tertinggi, ternyata memiliki IPM kedua tertinggi di Indonesia. IPM yang tinggi ini didukung oleh fakta bahwa DIY merupakan destinasi untuk melanjutkan *study* terutama jenjang pendidikan menengah dan tinggi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Khususnya di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki banyak sekolah menengah dan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Angka partisipasi sekolah di DIY tinggi karena ditambah dengan partisipasi para pelajar luar daerah yang sedang menempuh studi di DIY, tetapi setelah lulus atau

bekerja, sebagian dari mereka akan kembali ke daerah asal atau bermigrasi ke kota tempat mereka bekerja. Artinya IPM di DIY yang tinggi tidak menjadi penjamin adanya pemerataan pendapatan karena tingginya IPM ini sendiri bukanlah murni perbaikan kualitas masyarakat DIY (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020) Gorontalo sendiri secara umum memiliki pekerja dengan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah bahkan 51.77% dari penduduk bekerja yang tersedia di Gorontalo merupakan lulusan SD ke bawah. Data menunjukkan bahwa pengangguran di Gorontalo ini didominasi sebesar 53.43% oleh lulusan SMA dan SMK sederajat. Fenomena ini terjadi karena lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Gorontalo merupakan lapangan usaha pertanian, dimana lapangan usaha ini tidak menuntut tingkat pendidikan yang tinggi (BPS Provinsi Gorontalo, 2020).

Jawa Barat juga memiliki permasalahan terkait tenaga kerja, dimana hingga Agustus 2018, penyerapan tenaga kerja di Provinsi ini masih didominasi oleh para tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 38.89%. Fakta ini seiring dengan TPT di Jawa Barat yang didominasi oleh tingkat pendidikan SMK (16.97%) dan SMA (9.78%) (Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, 2019). Sama halnya dengan Jawa Barat, terbatasnya lapangan pekerjaan di DKI membuat tingginya IPM di DKI tidak menjamin pemerataan pendapatan. Berdasarkan data BPS, Dari total 572,780 pengangguran di DKI Jakarta, lulusan SMK mendominasi sebanyak 34.41% dan lulusan SMA sebesar 27.08% (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020). Sebagai daerah yang masuk dalam Kawasan Timur Indonesia (KTI), Papua mengalami masalah sulitnya akses karena topografi wilayah yang didominasi oleh pegunungan membuat pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan sulit dibangun secara merata (BPS Provinsi Gorontalo, 2021). Sulit akses ini membuat angka IPM di Papua sangat timpang, dimana Kota Jayapura dengan capaian IPM tertinggi yakni 80.16 poin namun sangat berbanding terbalik dengan capaian IPM terendah yaitu 30.75 poin berada di daerah Nduga (Bappeda Provinsi Papua, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan khususnya SMA dan SMK serta tidak meratanya fasilitas pendukung IPM membuat peningkatan IPM justru semakin memburuk ketimpangan.

Pengaruh UMP terhadap Ketimpangan Pendapatan di Lima Provinsi

Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi, artinya hasil ini sejalan dengan hipotesis yang ada. Hasil koefisien UMP yang negatif menandakan bahwa setiap kenaikan UMP akan menurunkan ketimpangan pendapatan artinya hasil ini sesuai dengan teori dari Hugh Rockoff tentang teori Kontrol Harga yang menyatakan bahwa upah minimum dilakukan demi meningkatkan pendapatan para pekerja miskin yang tetap bekerja di pasar. Hasil ini pula sejalan dengan penelitian dari Anshari, Azhar, dan Ariusni tahun 2018 dimana UMP berpengaruh signifikan negatif pada ketimpangan pendapatan di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2012-2017. DIY sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi ternyata memiliki tingkat upah terendah di Indonesia. Tingkat upah minimum yang rendah ini salah satunya terjadi dikarenakan lebih dominannya sektor informal di DIY. Pada Agustus 2019, 51.66% masyarakat DIY bekerja pada sektor informal, sedangkan 48.34% sisanya bekerja di sektor formal. Kendati demikian jika dilihat dari sisi standar hidup layak pada periode 2015-2019, di DIY selalu terjadi kenaikan standar hidup layak yang dilihat dari pengeluaran riil per kapita setahun (Juta Rp). Upah yang meningkat akan berimbas dari pendapatan yang diperoleh masyarakat sehingga tingkat konsumsi meningkat, ditambah biaya hidup yang murah, sehingga peningkatan upah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Kanwil DJPb Provinsi DIY, 2020).

Tingkat upah di Gorontalo meningkat setiap tahunnya, kendati demikian sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha yang paling mendominasi khususnya pertanian jagung. Hal ini menyebabkan kurangnya lapangan usaha formal, dan persebaran lapangan pekerjaan di daerah ini pun tidak merata, hal ini dapat dilihat dari pendapatan daerah dari sisi pajak penghasilan dimana pada triwulan tahun 2020 realisasi pendapatan PPh tertinggi berasal dari Kota Gorontalo yang mencapai Rp143.94 Miliar, sementara realisasi terendah ada di Kabupaten Boalemo yakni hanya Rp10.56 miliar atau hanya 3.98% dari total pendapatan PPh (BPS Provinsi Gorontalo, 2021). Upah minimum di Jawa Barat tersokong oleh adanya kawasan industri di beberapa daerah seperti Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi yang memiliki tingkat upah tertinggi di Jawa Barat. Jika dilihat dari sisi konsumsi masyarakat pun terlihat bahwa struktur ekonomi

Jawa Barat pada tahun 2020 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yakni mencapai sebesar 66.04% (Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, 2021). DKI Jakarta memiliki tingkat Upah tertinggi di Indonesia. Alasan peningkatan upah ini difungsikan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi para buruh di tengah mahalannya biaya hidup di Ibu Kota. Jika dilihat berdasarkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB didapati bahwa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan kontributor terbesar PDRB DKI Jakarta yakni sebesar 61.03% (Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, 2021). Papua juga merupakan daerah yang menetapkan tingkat upah minimum yang tinggi, hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya sektor pertambangan yang aktif berkontribusi terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi di Papua. Jika dilihat berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat, didapati data bahwa selama periode tahun 2017-2019 ekonomi Papua 43.68% masih digerakkan oleh sektor konsumsi rumah tangga (Bappeda Provinsi Papua, 2020). Kontribusi pengeluaran rumah tangga di masing-masing daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya menandakan bahwa tingkat upah yang meningkat dapat mendorong pendapatan masyarakat sehingga tingkat konsumsi pun memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB di setiap tahunnya.

Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Lima Provinsi

Hasil pengujian ini membuktikan kebenaran hipotesis yang menyatakan bahwa variabel belanja modal Pemerintah Provinsi mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia. Nilai koefisien yang negatif menyatakan bahwa kenaikan Belanja Modal dapat menurunkan angka ketimpangan pendapatan. Hasil ini sejalan dengan teori dari Rostow dan Musgrave yang mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi dialokasikan guna memacu pertumbuhan ekonomi (Sayifullah and Emmalian, 2018). Realisasi belanja modal seperti penyediaan infrastruktur pengadaan listrik, transportasi, pendidikan, dan kesehatan, merupakan investasi sektor publik yang tidak hanya memberikan efek pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi program padat karya, belanja modal juga memberi dampak pada pengembangan aktivitas ekonomi bagi perusahaan (Musfetriyeti, 2017). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian

dari A. A. Gede Dirga Kardita dkk (2018) yang menyatakan bahwa belanja modal mempengaruhi secara positif terhadap ketimpangan pendapatan di Bali pada tahun 1996-2015.

Di DIY kualitas infrastruktur publik yang ada tidak merata terutama di bidang pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur perekonomian seperti pasar akibat kurangnya ketersediaan dan akses yang sulit. Penduduk miskin tertinggi di DIY berada pada Kab. Kulon Progo dan Kab. Gunungkidul. Banyaknya masyarakat miskin di suatu daerah akan mempertinggi ketimpangan pendapatan, karena masyarakat miskin umumnya memiliki kemampuan berusaha yang lemah dan memiliki keterbatasan akses pada kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Kanwil DJPb Provinsi DIY, 2020). Kondisi ini juga terjadi pada DKI yang memiliki realisasi infrastruktur yang cukup memadai, dimana masih terdapat daerah yang tertinggal yakni Kepulauan Seribu. Ketertinggalan daerah ini berada dalam hal sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan, serta jumlah tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang terbatas (Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, 2021). Selama periode tahun 2016-2020 realisasi belanja modal Provinsi Jawa Barat masih terpusat di Jawa Barat Bagian Utara, akan tetapi di bagian selatan infrastruktur seperti jalan raya dan prasarana kelistrikan justru belum memadai untuk menyokong sistem transportasi dan kebutuhan industri (Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, 2021). Pada kedua Provinsi yakni Gorontalo dan Papua, infrastruktur adalah target utama dalam pemerataan pendapatan di kedua wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari tidak meratanya tingkat IPM di masing-masing daerah akibat sulitnya akses sarana pendidikan dan kesehatan. Untuk mengatasi hal ini Provinsi Papua memiliki agenda pembangunan dalam RPJMD tahun 2019-2023, yakni Infradas (Infrastruktur Dasar) Papua, dimana Infrastruktur dasar ini dibangun demi menciptakan pemerataan di desa-desa tertinggal atau terpencil (Bappeda Provinsi Papua, 2020). Begitu pula dengan Provinsi Gorontalo yang memiliki fokus pada dua sektor yaitu infrastruktur padat karya dan penataan destinasi wisata guna meningkatkan produktivitas masyarakat (Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, 2021). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja modal yang mampu meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat perlu dikembangkan agar menciptakan *multiplier effect* kepada sektor perekonomian lain sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan

menurunkan angka ketimpangan pendapatan di kelima daerah tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi berkoefisien negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini karena modal yang ada telah tersebar di beberapa sektor diluar pertanian seperti industri pengolahan dan industri perdagangan yang mayoritas berbentuk UKM yang berhasil mendorong pemerataan pendapatan masyarakat serta berkontribusi terhadap PDRB namun pengaruhnya tidak signifikan karena keberadaan sektor-sektor tersebut masih belum merata dan belum berkembang.

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan akibat tidak meratanya tingkat IPM di beberapa wilayah karena kurangnya fasilitas penyokong seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai membuat tingkat pengangguran di beberapa wilayah dengan IPM tertinggi masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan dimana pekerja berpendidikan rendah lebih terserap di pasar tenaga kerja karena bersedia bekerja di bidang apapun.

Upah minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan hal ini dikarenakan tingkat upah yang ada dapat memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat dan mendorong peningkatan pendapatan sehingga berpengaruh pada peningkatan tingkat konsumsi rumah tangga di masing-masing daerah dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Belanja modal pemerintah Provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan fasilitas yang membaik dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehingga mendorong produktivitas masyarakat sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata artinya mengurangi ketimpangan pendapatan.

Saran

Pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan secara agregat dari suatu daerah belum merata terutama untuk menyokong aktivitas ekonomi masyarakat dalam hal modernisasi ekonomi dikarenakan sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar di beberapa daerah seperti Gorontalo dan Papua.

Hasil IPM yang berpengaruh signifikan positif pun memberi penjelasan lebih lanjut bahwa penduduk yang berkualitas belum tentu mengurangi ketimpangan, karena sektor pertanian itu sendiri tidak membutuhkan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Untuk itu diperlukan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru khususnya pada sektor modern yang dapat membuka lapangan kerja dan menyerap pengangguran berpendidikan di daerah tersebut.

Upah minimum mampu mengurangi ketimpangan karena masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup layaknya, namun peningkatan upah yang terlalu tinggi beresiko mendorong pengangguran oleh karena itu pemerintah harus cermat dan bijak menentukan tingkat upah minimum agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi dengan memperhitungkan nilai inflasi dan melihat dari prespektif pelaku industri. Belanja modal pemerintah juga berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan, oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengutamakan pembangunan secara fisik di daerahnya masing-masing guna memperlancar mobilitas masyarakat sehingga produktivitas ekonomi dapat tercipta lebih cepat khususnya di kawasan timur Indonesia.

Keterbatasan dan Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan yang ada ialah terkait minimnya artikel melakukan riset di daerah timur Indonesia sehingga hanya mengandalkan laporan dari dinas terkait sehingga sumber yang ada terbatas. Untuk itu saran untuk peneliti selanjutnya ialah mengembangkan kembali terkait variabel yang tidak berpengaruh yakni pertumbuhan ekonomi, dan variabel IPM yang tidak sesuai dengan teori, dengan mengkaji lebih dalam dan menyeluruh guna memperkuat hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Muhammad; Azhar, Z. A. (2018). *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia*, 1(September), pp. 494–502.
- Badan Pusat Statistik (2020). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2020*. BPS, (57), pp. 1–8. Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1845/gini-ratio-maret-2021-tercatat-sebesar-0-384-.html>.

- Bappeda Provinsi Papua. (2020). *Analisis Kerangka Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2020*. Bappeda Provinsi Papua.
- BPS DIY and Bappeda DIY. (2020). *Analisis Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020*. p. 144. Available at: <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/publikasi/detail/30-analisis-ketimpangan-pendapatan-diy-2020>.
- BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2019*. BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia Dki Jakarta 2020*. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- BPS Provinsi Gorontalo. (2020). *Statistik Daerah Provinsi Gorontalo 2020*. BPS Provinsi Gorontalo.
- BPS Provinsi Gorontalo. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo 2020*. BPS Provinsi Gorontalo. Available at: <https://gorontalo.bps.go.id/indicator/6/50/1/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama.html>.
- Cahya Saputri, R. G. (2017). Pengaruh Produktivitas Sektoral Dan Laju Pdrb Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah Pada Tahun 2006 – 2015. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 2(1), pp. 103–112. DOI: 10.31002/rep.v2i2.226.
- Fauzia, A. A. and Suseno, D. A. (2017). Analisis Determinan Disparitas Pendapatan di Kawasan Purwomanggung Tahun 2009-2015. *Economics Development Analysis Journal*, 6(4), pp. 446–455.
- Ghozali, I. and Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit - UNDIP.
- Gujarati, D. N. and Porter, D. C. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1 Edisi 5*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Hariani, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, 3(1), pp. 13–23. Available at: <https://ejournal.unai.ac.id/index.php/TIJA>
- B.
- Islami, F. S. and SBM, N. (2018). Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(1), pp. 29–39. DOI: 10.24856/mem.v33i1.564.
- Jelanti, D. (2020). Pengaruh Rasio Profitabilitas, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 3(2), pp. 289–303. DOI: 10.33753/madani.v3i2.123.
- Kanwil DJPb Provinsi DIY. (2020). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2019*. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Available at: <http://djp.kemenkeu.go.id>.
- Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Kajian Fiskal Regional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020*. Kanwil DJPb Provinsi DIY.
- Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. (2018). *Kajian Fiskal Regional 2018*.
- Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. (2021). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2020*. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.
- Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. (2019). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2018*. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. Available at: <http://djp.kemenkeu.go.id>.
- Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. (2021). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Barat tahun 2020*. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. Available at: https://djpbn.kemenkeu.go.id/portal/image/s/file_artikel/file_pdf/kfr/2019/20_kfr2019_kaltim.pdf.
- Kardita, A. A. G. D., Setiawina, N. D. and Budiasa, I. G. S. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, DAU, dan Shere Expor Impor Terhadap Pdrb, Terhadap Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Bali*. 7, pp. 1777–1802.
- Khoirudin, R. and Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 15(1), pp. 17–30.
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N. and Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Dinamic: Directory Journal of Economic*, 1(3), pp. 338–347.
- Musfetriyeti, W. (2017). Pengaruh Fluktuasi Harga

- Minyak Dunia, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ecosains*, 6(1), pp. 47–62. DOI: 10.1145/3132847.3132886.
- Nadya, A. and Syafri, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), p. 37. DOI: 10.25105/me.v27i1.5300.
- Prawoto, N. and Cahyani, R. D. (2020). Analysis of unequal distribution of population income in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), pp. 489–495. DOI: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.489.
- Priyono dan Zainuddin Ismail (2016) *Teori Ekonomi*.
- Riandi, M. and Varlitya, C. R. (2020) ‘Pengaruh Kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Indonesia. *JURNAL EKOMBIS*, 6(1), pp. 57–68. Available at: <http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/2008>.
- Rosa, Y. Del and Sovita, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi*, 2(4), pp. 41–52.
- Sayifullah and Emmalian. (2018). Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(1), pp. 66–81. DOI: 10.35448/jequ.v8i1.4962.
- Sidqiy, A. et al. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 9(2018), pp. 48–57.
- Statistik, B. P. S. S. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020*.
- Suryani, K. G. and Woyanti, N. (2021). The Effect of Economic Growth, HDI, District/City Minimum Wage and Unemployment on Inequity of Income Distribution in Province of D.I Yogyakarta (2010-2018). *Media Ekonomi dan Manajemen*, 36(2), p. 170. doi: 10.24856/mem.v36i2.1990.